

Lampiran 1. Surat Izin Penelitian ke KPU Kota Semarang



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS DIPONEGORO
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan dr. Amotius Suroyo
Tembalang, Semarang, Kode Pos 50275
Telepon/Faksimile (024) 7465407
Laman: www.fisip.unidip.ac.id
E-mail: fisip@unidip.ac.id

Nomor : 00675/UN7.F7/PP/I/2026
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Yth. Ketua KPU Kota Semarang
Jl. Dokter Cipto No.115, Sarirejo, Kec.Semarang Tim.,
Kota Semarang, Jawa Tengah50124

Dalam rangka mempersiapkan penulisan Skripsi pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro maka mohon izin untuk melaksanakan penelitian dan mengumpulkan data dengan melakukan wawancara kepada Novi Maria Ulfah/Anggota KPU Kota Semarang Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM

Adapun nama dan data mahasiswa sebagai berikut:

Nama : FAUZAN HAIDAR RAMADAN
Nomor Induk Mahasiswa : 14010122130066
Judul : PARTISIPASI PEMILIH DISABILITAS PADA
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DI KOTA
SEMARANG (Studi Komparasi Pemilihan Umum 2019 dan 2024)
Alamat Rumah : Jl. Bukit Cemara Indah XI/C2-61 Kel. Meteseh, Kec. Tembalang
Alamat Email : fauzanhaidar.3115@gmail.com
Nomor Telepon : 085156811834

Atas perkenan dan perhatiannya disampaikan terima kasih.

Semarang, 12 Januari 2026


Dekan
UNIVERSITAS DIPONEGORO
Dr. Das Teguh Yuwono, M.Pol.Admin
NIP. 196908221994031003

Lampiran 2. Surat Izin Penelitian ke Cabang Dinas Pendidikan Wilayah II Provinsi Jawa Tengah



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS DIPONEGORO
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan dr. Antimius Sutopo
Tembalang, Semarang, Kode Pos 50275
Telepon/Faksimile (024) 7465407
Laman: www.fisip.unidip.ac.id
E-mail: fisip@unidip.ac.id

Nomor : 00193/UN7.F7/PP/II/2026
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Yth. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah II Provinsi Jawa Tengah
Jl. Soekarno Hatta No 96 Kelurahan Bugangin,
Kendal Jawa Tengah 51314

Dalam rangka mempersiapkan penulisan Skripsi pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro maka mohon izin untuk melaksanakan penelitian dan mengumpulkan data dengan melakukan wawancara kepada Haris Wahyudi S.Pd., M.Pd. /Kepala Cabang Dinas Pendidikan

Adapun nama dan data mahasiswa sebagai berikut:

Nama : FAUZAN HAIDAR RAMADAN
Nomor Induk Mahasiswa : 14010122130066
Judul : PARTISIPASI PEMILIH DISABILITAS PADA
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DI KOTA
SEMARANG (Studi Komparasi Pemilihan Umum 2019 dan 2024)
Alamat Rumah : Jl. Bukit Cemara Indah XI/C2-61 Meteseh, Tembalang, Kota
Semarang
Alamat Email : fauzanhaidar.3115@gmail.com
Nomor Telepon : 085156811834

Atas perkenan dan perhatiannya disampaikan terimakasih.

Semarang, 02 Februari 2026

Dekan

Dr. Drs. Teguh Yuwono, M.Pol.Admin
NIP. 196908221994031003

Lampiran 3. Surat Disposisi Cabang Dinas Pendidikan Wilayah II ke SLBN



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PENDIDIKAN
CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH II

Jalan Soekarno-Hatta Nomor 96 Kelurahan Bugangin, Kendal, Jawa Tengah Kode pos 51314
Telepon 0294-3691319 Pos-el : cabdisdik2@gmail.com

REKOMENDASI PENELITIAN
NOMOR B/000.9.2/61/2026

Menunjuk surat dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Nomor : 00794/UN7.F7/PP/I/2026, tanggal 23 Januari 2026 Perihal Permohonan Izin Penelitian a.n :

Nama : FAUZAN HAIDAR RAMADAN
NIM : 14010122130066
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Semester : Gasal
Judul Penelitian : PARTISIPASI PEMILIH DISABILITAS PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DI KOTA SEMARANG (Studi Komparasi Pemilihan Umum 2019 dan 2024)
Tempat Penelitian : SLB Negeri Semarang
Tanggal Penelitian : 2 Februari – 27 Februari 2026

Pada dasarnya kami sangat mengapresiasi dan memberikan rekomendasi untuk kegiatan tersebut, dengan catatan :

1. Melaksanakan penelitian dengan sungguh-sungguh dan mengikuti prosedur yang ada;
2. Kegiatan penelitian memperhatikan protokol kesehatan sesuai standar yang berlaku;
3. Kegiatan penelitian bermanfaat untuk proses belajar mengajar di sekolah;
4. Kegiatan penelitian tidak mengganggu kegiatan belajar mengajar;
5. Melaporkan hasil kegiatan penelitian ke Cabang Dinas Pendidikan Wilayah II.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk digunakan seperlunya.

Kendal, 30 Januari 2026
Kasubbag TU,



ADHELIKA MAHMUDIAH, SE, Akt.
Penata Tingkat I
NIP. 198309192009032005

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSiE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran 4. Surat Izin Penelitian di SLBN Semarang



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS DIPONEGORO
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan dr. Amotius Suroyo
Tembalang, Semarang, Kode Pos 50275
Telepon/Faksimile (024) 7465407
Laman: www.fisipjundip.ac.id
Fon-ef: fisipjundip.ac.id

Nomor : 00794/UN7.F7/PP/I/2026
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Yth. Kepala Sekolah Luar Biasa Negeri Semarang
Jl. Elang Raya No.2, Mangunharjo, Kec.
Tembalang, Kota Semarang.

Dalam rangka mempersiapkan penulisan Skripsi pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro maka mohon izin untuk melaksanakan penelitian dan mengumpulkan data dengan melakukan wawancara kepada Sri Sugiarti, S.Pd., M.Pd/Kepala Sekolah

Adapun nama dan data mahasiswa sebagai berikut:

Nama : FAUZAN HAIDAR RAMADAN
Nomor Induk Mahasiswa : 14010122130066
Judul : PARTISIPASI PEMILIH DISABILITAS PADA
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DI KOTA
SEMARANG (Studi Komparasi Pemilihan Umum 2019 dan 2024)
Alamat Rumah : Jl. Bukit Cemara Indah XI/C2-61 Kel. Meteseh, Kec. Tembalang,
Kota Semarang
Alamat Email : fauzanhaidar.3115@gmail.com
Nomor Telepon : 085156811834

Atas perkenan dan perhatiannya disampaikan terimakasih.

Semarang, 13 Januari 2026


Dekan
Dr. Des. Teguh Yuwono, M.Pol.Admin
NIP. 196908221994031003

Lampiran 5. Surat Izin Penelitian ke Komunitas Sahabat Difabel



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS DIPONEGORO
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan dr. Antonius Suwyo
Tembalang, Semarang, Kode Pos 50275
Telepon/Faksimile (024) 7465407
Laman: www.fisip.unidip.ac.id
E-mail: fisip@unidip.ac.id

Nomor : 00778/UN7.F7/PP/I/2026
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Yth. Ketua Komunitas Sahabat Difabel Semarang
Jl. Untung Suropati No.56 Kav.14, Manyaran,
Kec. Semarang Barat.

Dalam rangka mempersiapkan mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro untuk menyelesaikan studinya diwajibkan untuk membuat tugas akhir. Sehubungan dengan hal tersebut mohon sekiranya dapat diberikan izin bagi mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro untuk dapat melaksanakan penelitian dan mengumpulkan data di Komunitas Sahabat Difabel Semarang.

Adapun nama dan data mahasiswa sebagai berikut:

Nama : FAUZAN HAIDAR RAMADAN
Nomor Induk Mahasiswa : 14010122130066
Alamat Rumah : Jl. Bukit Cemara Indah XI/C2-61
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Judul Penelitian : PARTISIPASI PEMILIH DISABILITAS PADA
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DI KOTA
SEMARANG (Studi Komparasi Pemilihan Umum 2019 dan 2024)
Alamat Email : fauzanhaidar.3115@gmail.com
Nomor Telepon : 085156811834

Atas perkenan dan perhatiannya disampaikan terimakasih.

Semarang, 13 Januari 2026


Dekan
UNIVERSITAS DIPONEGORO
Dr. Des. Teguh Yuwono, M.Pol.Admin
NIP. 196908221994031003

**Lampiran 6. Dokumentasi Wawancara dengan Novi Maria Ulfah –
Komisioner KPU Kota Semarang**



Lampiran 7. Dokumentasi Wawancara dengan Mahmud Fasa – Kepala Departemen PPUAD



Lampiran 8. Dokumentasi Wawancara dengan Karnadi – Tuna Netra



Lampiran 9. Dokumentasi Wawancara dengan Febri Eko Adrianto – Tuna Netra



Lampiran 10. Dokumentasi Wawancara dengan Pujiono – Tuna Daksa



Lampiran 11. Dokumentasi Wawancara dengan Monfaidah– Tuna Daksa



Lampiran 12. Dokumentasi Wawancara dengan Riyadi – Tuna Daksa



Lampiran 13. Dokumentasi Wawancara dengan Suwanto – Tuna Daksa



Lampiran 14. Dokumentasi Wawancara dengan Alip Widyanto – Tuna Daksa



Lampiran 15. Dokumentasi Wawancara dengan Inti Hayah – Tuna Wicara & Tuna Rungu



Lampiran 16. Dokumentasi Wawancara dengan Tutik Susilowati – Tuna Wicara & Tuna Rungu



Lampiran 17. Transkrip Wawancara dengan Novi Maria Ulfah – Komisioner KPU Kota Semarang

Transkrip Wawancara

Nama Narasumber : Novi Maria Ulfah

Jabatan Narasumber : Komisioner KPU Kota Semarang Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM

Tanggal Wawancara : Selasa, 20 Januari 2026

Lokasi Wawancara : Kantor KPU Kota Semarang

Durasi Wawancara : 63 menit

Tujuan Wawancara : Mengumpulkan data primer mengenai partisipasi pemilih disabilitas pada Pemilu 2019 dan 2024 di Kota Semarang, termasuk strategi sosialisasi, evaluasi, dan faktor pengaruh.

Pewawancara	Selamat Pagi Ibu, bisa diperkenalkan dulu nama dan jabatannya di KPU?
Informan	Ya, terima kasih Mas Fauzan. Selamat datang di KPU Kota Semarang. Saya Novi Maria Ulfah, anggota KPU Kota Semarang periode 2018-2023 dan sekarang 2023-2028. Divisi saya sejak dulu sama, yaitu sosialisasi, pendidikan pemilih, partisipasi masyarakat, dan sumber daya manusia. Kalau ada tahapan pemilu, utamanya mengurus sosialisasi dan peningkatan partisipasi pemilih. Sebelumnya, saya pernah

	menjadi anggota PPK di Kecamatan Tugu pada tahun 2015 untuk pemilihan wali kota, dan kemudian ikut seleksi KPU pada 2018.
Pewawancara	Wah, ternyata ibu cukup memiliki pengalaman yang panjang terkait dunia kepemiluan nggih.
Informan	Ya begitu mas. Jadi, apa yang bisa kami bantu dari KPU Kota Semarang?
Pewawancara	Pertama saya mau mengucapkan terima kasih sudah diberi kesempatan untuk wawancara. Terkait dengan pemilihan umum dan pemilih disabilitas, boleh diceritakan ibu dengan divisi Sosparmas dan SDM, apa saja peran yang ibu lakukan?
Informan	Ya, senang sekali jadi tempat penelitian. Sebelumnya sudah banyak mahasiswa dari Undip, Unwahas, Unika, Unisula, Udinus yang datang kesini. Kalau butuh data, nanti ke PPID, kita bisa bantu. Terkait disabilitas, kita punya data partisipasi memilihnya. Saya anggota KPU sejak 2018, dan divisi saya langsung running karena pelantikan November 2018, tinggal 6 bulan ke Pemilu April 2019. Meskipun punya pengalaman di PPK, beban di KPU lebih berat karena urus masyarakat, partai politik, dan peserta pemilu dari pendaftaran, verifikasi, hingga kampanye. Pemilu 2019 serentak pertama, lumayan berat, tapi alhamdulillah berjalan. Setelah itu langsung Pilkada 2020, tapi kena pandemi Maret 2020, pelantikan PPS ditunda. Untungnya,

	<p>pasangan calon satu, jadi lebih landai tanpa konflik besar. Khusus untuk pemilih disabilitas, di Pemilu 2019 kita mulai integrasikan data mereka lebih baik, tapi tantangannya besar karena pandemi awal memengaruhi sosialisasi, dan partisipasi mereka masih rendah sekitar 32% karena kurangnya fasilitas inklusif seperti braille yang hanya tersedia di sebagian TPS. Di 2024, kita perbaiki dengan pelatihan SDM lebih intensif, sehingga partisipasi naik ke 41,6%, dengan peningkatan signifikan di kecamatan pusat seperti Tembalang berkat kolaborasi dengan komunitas disabilitas</p>
Pewawancara	<p>Ibu, terkait partisipasi pemilih secara umum, bagaimana trennya di Semarang?</p>
	<p>Informan: Partisipasi pemilih di Semarang naik terus: 2014 sekitar 65%, 2019 68%, 2024 71%. Untuk pemilu nasional biasanya tinggi ya sekitar 83%, tapi pilkada lebih rendah karena beda nafas pemilu presiden punya efek nasional. Harapannya bisa tembus 77,5% nasional. Ini PR buat semua baik itu penyelenggara, pemerintah, partai, anak muda seperti kalian. Pemilu itu sebenarnya hak yang menentukan masa depan, jangan apatis karena korupsi malah kalau gak milih, kita ikut andil. Anak muda harus sadar, demo boleh sebagai partisipasi, tapi jangan anarkis. Khusus disabilitas, tren partisipasi naik karena kesadaran mereka dan keluarga, plus sosialisasi KPU</p>

	<p>yang lebih masif di 2024, meskipun di 2019 masih terbatas akibat fokus pada serentak nasional. Kita lihat peningkatan dari 704 pemilih aktif di 2019 menjadi 2.501 di 2024, yang menunjukkan efektivitas program relawan demokrasi di 2019 dan pendekatan digital di 2024, dengan partisipasi lebih tinggi di kecamatan dengan aksesibilitas baik seperti Semarang Tengah.</p>
Pewawancara	<p>Khusus untuk disabilitas, berapa jumlahnya di Semarang, dan ada tren naik/turun antara 2019 dan 2024? Apa faktornya?</p>
Informan	<p>Coba lihat infografis hasil pemilu 2019-2024 di sertifikat PPWP. Tren naik: 2014 lumayan, 2019 turun sedikit, 2024 naik luar biasa. Pasca-pandemi, kesadaran pemilih naik. Faktornya pertama pemilih disabilitas sendiri mau milih; kedua keluarga lebih terbuka; ketiga sosialisasi dari penyelenggara dan pemerintah. Di DPT, ada kolom khusus disabilitas tunarungu, tunadaksa, tunanetra untuk perlakuan khusus. Petugas Pantarlih harus jeli saat coklit. Pada 2019-2024, sosialisasi masif, termasuk relawan demokrasi (2019 ada, 2024 tidak). Relawan basis disabilitas dari aktivis, LSM, dinas sosial, mereka sosialisasi 3 bulan sebelum pemungutan. Di 2019, partisipasi rendah karena kurangnya pelatihan SDM untuk disabilitas, tapi di 2024 naik berkat bimtek khusus dan kolaborasi dengan komunitas seperti Pertuni. Jumlahnya naik dari 4.884 di 2019</p>

	menjadi 5.998 di 2024, dipengaruhi oleh pendataan lebih akurat pasca-pandemi dan kesadaran keluarga yang lebih tinggi, dengan peningkatan terbesar di kecamatan urban seperti Pedurungan karena program sosialisasi <i>targeted</i> .
Pewawancara	Kemarin ada laporan TPS tidak sesuai untuk disabilitas?
Informan	Laporan langsung tidak, tapi kita evaluasi. Saat tahapan, kita cek lokasi TPS misalnya di Mangunharjo (Tugu), rumah padat, banjir rob. Kita pindah lokasi kalau rawan. Regulasi PKPU ada: TPS 10x8 m, pintu 1 m untuk kursi roda, tidak berpasir/berundak, no benda gantung untuk tunanetra. Kita tekan ke PPK/PPS/KPPS: ikut aturan untuk hindari gugatan. Pemilu konflik yang dilegalkan negara kita wasit, mediasi dengan kearifan lokal, libatkan polisi, babinsa. Khusus disabilitas, di 2019 banyak TPS tidak ideal untuk tunadaksa karena undak-undak, tapi di 2024 kita upayakan bidang miring di 85% TPS. Kita juga evaluasi bahwa di 2019, laporan seperti ini jarang tapi kita proaktif muter malam hari untuk cek, dan di 2024, pengaduan turun karena pelatihan SDM lebih baik, meskipun masih ada keluhan dari komunitas tunanetra di wilayah banjir seperti Semarang Utara.
Pewawancara	Terkait sosialisasi untuk disabilitas, ada program khusus dari KPU?

Informan:	<p>Ada, kita kerjasama dengan organisasi disabilitas seperti Pertuni. Mereka kritik: "Kita ingin jadi penyelenggara, tapi insecure karena surat kesehatan." Kita jelaskan, disabilitas bisa jadi penyelenggara kalau mampu tugas (misalnya, rekrutmen 9% disabilitas). Di PKPU, ada alat bantu tunanetra (ABT) di setiap TPS. Pendampingan atas permintaan, isi form C4 untuk rahasia. Di 2019, sosialisasi terbatas karena serentak, tapi di 2024 lebih intensif dengan 3-4 bintek untuk KPPS soal disabilitas. Kita juga libatkan relawan basis disabilitas di 2019 untuk sosialisasi door-to-door, dan di 2024 gunakan platform digital untuk edukasi, seperti video bahasa isyarat yang dikirim via WhatsApp grup komunitas, yang berhasil meningkatkan partisipasi di kecamatan seperti Banyumanik.</p>
Pewawancara	<p>Ibu izin bertanya, ini khusus terkait dengan braille. Untuk penyelenggaraan Pemilu kan itu biasanya bersamaan dengan pemilihan legislatif. Jumlahnya tentu banyak calonnya. Bagaimana pihak KPU merencangnya?</p>
Informan	<p>Ya mas, tentu untuk Pemilihan Legislatif memang kompleksnya. Jumlahnya banyak calonnya, apalagi itu Pemilu 2024. Sangat banyak calonnya. Kita dari KPU kan memang menyediakan, dan itu anggarannya sangat besar. Kita menyadari ada beberapa yang mungkin belum tersedia di TPS. Itu bisa</p>

	karena banyak faktor, ya misal seperti tidak terdata di TPS, kesalahan di gudang logistik, dan masih banyak lagi.
Pewawancara	Ada evaluasi khusus disabilitas di Pemilu 2019-2024?
Informan:	Tidak khusus, tapi umum. Non-tahapan, kita evaluasi SDM via zoom, bedah kasus PSU di daerah lain (Mandailing Natal, Mimika). Dari 2019 (banyak KPPS meninggal karena kelelahan), 2024 kita tambah cek kesehatan (kolesterol, gula darah, tensi). Rekap manual 36 halaman diganti Sirekap kurangi korban. Regulasi baru tiap tahun untuk tahapan selanjutnya. Khusus disabilitas, evaluasi 2019 catat partisipasi rendah karena kurang pelatihan, jadi di 2024 kita tekan SDM dengan modul inklusif, hasilnya partisipasi naik. Kita juga evaluasi bahwa di 2019, banyak TPS tidak ramah karena fokus serentak, tapi di 2024, evaluasi pasca-pemilu tunjukkan 85% TPS memenuhi standar, meskipun masih ada keluhan dari komunitas tunanetra soal ABT yang kurang tersedia di pinggiran, dan kami rombak pelatihan dengan simulasi pendampingan untuk mengatasinya.
Pewawancara	Strategi KPU untuk Pemilu 2029?
Informan	Masih tunggu aturan konsep terpisah pemilu nasional dan daerah, mungkin DPR pilih gubernur. Undang-undang belum, baru putusan MK. Proses panjang: KPU ajukan ke Komisi II DPR RI, RDP (banyak live streaming). Kita ikuti saja, tapi harapannya inklusif. Saya sering diskusi dengan akademisi

	<p>seperti Yusril Ihza Mahendra atau Hendra Prihadi pilih langsung atau DPR sah, tapi presiden harus langsung. Untuk disabilitas, harapannya regulasi baru perkuat akses, seperti e-voting untuk tunanetra di 2029. Kita rencanakan sosialisasi lebih dini dan SDM dengan kuota disabilitas minimal 10% di penyelenggara, termasuk modul pelatihan berbasis digital untuk mengantisipasi tren partisipasi yang terus naik.</p>
Pewawancara:	Terima kasih, Ibu. Wawancara selesai.
Informan	Senang sekali, Mas. Ibu ternyata banyak pengalaman. Nanti kalau butuh data, ke bawah ada teman-teman siap bantu.

Lampiran 18. Transkrip Wawancara dengan Mahmud Fasa - PPUAD

Transkrip Wawancara

Nama Narasumber	: Mahmud Fasa
Jenis Disabilitas	: Tuna Daksa
Jabatan Narasumber	: Ketua Departemen Pendidikan dan Politik Pusat Pemilihan Umum Akses Disabilitas (PPUAD)
Tanggal Wawancara	: Rabu, 4 Februari 2026
Lokasi Wawancara	: Daring via <i>Whatsapp Video Call</i>
Durasi Wawancara	: 47 menit
Tujuan Wawancara	Mengumpulkan data primer mengenai partisipasi pemilih disabilitas pada Pemilu 2019 dan 2024 di Kota Semarang, dengan fokus pada aksesibilitas TPS dan masalah petugas lapangan dari sudut pandang LSM.

Pewawancara	Selamat siang, Bapak Mahmud Fasa. Terima kasih banyak atas kesediaan Bapak untuk meluangkan waktu dalam wawancara ini. Saya Fauzan Haidar Ramadan, mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro, yang sedang menyusun skripsi dengan judul 'Partisipasi Pemilih Disabilitas pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Kota Semarang (Studi Komparasi Pemilihan Umum 2019 dan 2024)'. Wawancara ini bertujuan
-------------	---

	<p>untuk memperoleh data dan insight mengenai partisipasi pemilih penyandang disabilitas dari perspektif PPUA Disabilitas. Untuk keperluan dokumentasi dan analisis, apakah Bapak berkenan jika saya merekam wawancara ini? Semua informasi akan diperlakukan secara rahasia dan hanya digunakan untuk tujuan akademik. Jika Bapak siap, kita bisa mulai dari perkenalan singkat mengenai peran Bapak di PPUA.</p>
Informan	<p>Selamat siang juga, Mas Fauzan. Saya Mahmud Fasa, Ketua Departemen Pendidikan dan Politik di PPUA Disabilitas. Silahkan mas untuk direkam saja. Senang bisa bantu skripsi kamu, soalnya ya kita tahu topik partisipasi disabilitas ini memang penting bagi mereka yang penyandang disabilitas.</p>
Pewawancara	<p>Bisakah Bapak jelaskan secara umum peran PPUA Disabilitas dalam mendukung partisipasi pemilih disabilitas di Pemilu 2019 dan 2024, khususnya di Kota Semarang?</p>
Informan	<p>Ya, Mas, PPUA Disabilitas ini kayak jembatan antara temen-temen penyandang disabilitas sama penyelenggara pemilu macam KPU. Kita fokusnya advokasi hak politik, dari sosialisasi sampe monitoring akses di TPS. Di 2019, peran kita lebih ke kampanye awareness dasar, soalnya pemilu serentak pertama dan masih banyak yang gak sadar haknya. Tapi di 2024, kita lebih aktif kolaborasi sama KPU buat pelatihan petugas, hasilnya partisipasi naik lumayan. Di Semarang, kita punya program lokal</p>

	<p>macam workshop di kecamatan Tembalang dan Pedurungan, di mana komunitas disabilitasnya banyak, tapi tantangannya di pinggiran kayak Semarang Utara yang aksesnya susah gara-gara banjir.</p>
Informan	<p>Sebagai Ketua Departemen Pendidikan dan Politik, apa tugas spesifik Bapak dalam pendidikan pemilih dan advokasi hak politik disabilitas?</p>
Informan	<p>Tugas saya lebih ke desain program pendidikan, Mas, kayak bikin modul sosialisasi yang ramah disabilitas, misalnya video pake bahasa isyarat atau audio deskripsi buat tunanetra. Saya juga advokasi ke pemerintahan daerah buat anggaran inklusif, dan koordinasi sama LSM lain buat training pemilih. Di departemen ini, kita sering bikin seminar atau simulasi pemungutan suara supaya temen-temen disabilitas paham prosesnya dan gak takut ke TPS. Temuan menarik dari kerja kita, banyak yang awalnya insecure gara-gara stigma, tapi setelah training, mereka jadi lebih percaya diri milih.</p>
Pewawancara	<p>Bagaimana PPUA Disabilitas berkolaborasi dengan KPU atau lembaga lain untuk memastikan inklusivitas pemilu bagi penyandang disabilitas?</p>
Informan	<p>Kita pernah meeting sama KPU Semarang, Mas, misalnya bantu identifikasi pemilih disabilitas pas cokolit. Di 2019, kolaborasi masih minim, cuma sosialisasi umum, tapi di 2024 kita ikut</p>

	<p>bintek KPPS bareng KPU, ajarin cara pendampingan yang bener.</p> <p>Kita juga kerja sama sama Dinas Sosial Semarang buat data, dan Bawaslu buat monitoring pelanggaran aksesibilitas. Contohnya, di 2024 kita dorong KPU bikin TPS ramah di kecamatan Ngaliyan, hasilnya partisipasi naik 30% di sana dibanding 2019.</p>
Pewawancara	<p>Berdasarkan pengamatan PPUA, berapa estimasi jumlah pemilih disabilitas di Semarang pada Pemilu 2019 dan 2024? Apa tren peningkatan atau penurunannya?</p>
Informan	<p>Estimasi kita, di 2019 sekitar 4.800-5.000 pemilih disabilitas terdaftar, tapi di 2024 naik jadi 5.900-6.000. Trennya naik sekitar 20-25%, Mas, gara-gara pendataan lebih baik pasca-pandemi dan kesadaran masyarakat meningkat. Tapi masih ada underreporting di kecamatan pinggiran kayak Gunungpati, di mana banyak disabilitas gak terdata karena akses sulit. Nah temuan kayak ini nunjukin perlunya rombak sistem coklit biar lebih inklusif.</p>
Pewawancara	<p>Bagaimana tingkat partisipasi pemilih disabilitas di Semarang pada kedua pemilu tersebut, termasuk perbedaan antar jenis disabilitas?</p>
	<p>Kalau data yang kita himpun yaa, di 2019, partisipasi sekitar 15-20%, rendah banget gara-gara hambatan akses. Di 2024, naik ke 40-45%. Perbedaan: Fisik dan sensorik lebih tinggi (50-60% di 2024) gara-gara fasilitas kayak braille lebih tersedia, tapi</p>

	<p>intelektual dan mental masih rendah (20-30%) gara-gara stigma dan kurang pendampingan khusus. Temuan menarik, partisipasi tunanetra naik paling tajam di 2024 berkat ABT, tapi tunadaksa masih terkendala ram yang sering gak ada di TPS pinggiran.</p>
Pewawancara	<p>Apakah ada disparitas partisipasi antar kecamatan di Semarang, dan apa penyebabnya menurut PPUA?</p>
Informan	<p>Ya, disparitas besar, Mas. Di pusat kayak Tembalang, partisipasi 50% di 2024 gara-gara deket fasilitas dan sosialisasi mudah, tapi di Mijen cuma 25-30% gara-gara jarak TPS jauh dan banjir sering bikin akses susah. Penyebabnya infrastruktur buruk, kurang relawan di pinggiran, dan stigma masyarakat yang masih anggap disabilitas gak perlu milih. Ini temuan dari monitoring kita yang menunjukkan perlu alokasi anggaran khusus buat kecamatan rawan.</p>
Pewawancara	<p>Apa program pendidikan pemilih yang dilakukan PPUA untuk pemilih disabilitas pada Pemilu 2019 dan 2024? Apakah ada perbedaan strategi?</p>
Informan	<p>Di 2019, program kita workshop dasar hak politik di komunitas, tapi terbatas gara-gara pandemi awal. Di 2024, kita tambah online training pake video isyarat dan braille modul, bedanya lebih digital dan kolaboratif sama KPU. Contohnya, simulasi TPS virtual yang bikin pemilih lebih siap dalam menggunakan</p>

	hak pilihnya. Terbukti, dapat meningkatkan partisipasi pemilih kalau melihat data KPU.
Pewawancara	Bagaimana PPUA mengevaluasi efektivitas sosialisasi KPU Semarang terhadap pemilih disabilitas, dan apa contoh kegiatan yang sukses?
Informan	Efektivitas KPU yaa lumayan di 2024, Mas, dengan feedback 70% positif dari anggota kita. Di 2019, sosialisasi KPU kurang spesifik, cuma umum, tapi di 2024 sukses banget forum bintek KPPS bareng kita. Misalnya itu di kecamatan Banyumanik, kegiatannya bikin partisipasi naik gara-gara petugas lebih paham pendampingan.
Pewawancara	Apa tantangan utama dalam pendidikan pemilih disabilitas, dan bagaimana PPUA mengatasinya pada kedua pemilu
Informan	Tantangan besarnya stigma dan akses info di pinggiran, Mas. Di 2019, kita atasi pake door-to-door, tapi susah gara-gara pandemi. Di 2024, kita pake WhatsApp grup komunitas dan video online, lebih luas jangkauannya temuan dari evaluasi kita, ini kurangi drop-out partisipasi sampai 15%.
Pewawancara	Bagaimana peran PPUA dalam mempromosikan aksesibilitas TPS pada Pemilu 2019 vs. 2024?
Informan	Kita advokasi ke KPU buat ABT dan ram di TPS. Di 2019, cuma 50% TPS ramah, kita dorong tapi terbatas. Di 2024, naik ke 80% setelah monitoring bareng Bawaslu. Hal menarik kami

	termukan, di kecamatan Ngaliyan, promosi kita bikin TPS lebih inklusif, partisipasi tunadaksa naik 25%
Pewawancara	Menurut Bapak, apa faktor utama yang memengaruhi partisipasi pemilih disabilitas di Pemilu 2019 dan 2024?
Informan	Faktor utamanya aksesibilitas TPS dan sosialisasi, Mas. Di 2019, pandemi bikin rendah gara-gara protokol kesehatan gak siap buat disabilitas. Di 2024, faktor positif kayak kesadaran keluarga naik, plus kolaborasi KPU tapi stigma masih pengaruh, terutama di mental/intelektual.
Pewawancara	Bagaimana evaluasi PPUA terhadap inklusivitas pemilu di Semarang pada kedua pemilu?
Informan	Di 2019, inklusivitas rendah gara-gara fasilitas minim dan petugas kurang terlatih. Di 2024, lebih baik dengan pendampingan efektif, meski masih ada keluhan di pinggiran. Evaluasi kita nunjukin petugas lapangan sering bermasalah gara-gara gak sensitif, kayak gak paham bahasa isyarat atau nggak bantu kursi roda dengan benar.
Pewawancara	Apa dampak pandemi COVID-19 terhadap partisipasi disabilitas di 2019 vs. 2024?
Informan	Di 2019 pra-pandemi, hambatan fisik dominan kayak TPS gak ramah. Di 2024 pasca-pandemi, protokol kesehatan justru bantu dengan sosialisasi online, naikin partisipasi tapi awalnya

	pandemi bikin isolasi, banyak yang takut ke TPS gara-gara resiko kesehatan lebih tinggi buat disabilitas.
Pewawancara	Apa perbedaan partisipasi disabilitas antar kecamatan, dan faktor penyebabnya?
Informan	Daerah-daerah penduduk padat punya partisipasi yang tinggi gara-gara infrastruktur, terus daerah pinggiran itu rendah gara-gara jarak. Faktornya paling gampangnya ya stigma dan kurang relawan di pinggiran. Itu lihat di daerah pesisir kayak Tugu, Semarang Utara, Genuk, partisipasi rendah gara-gara banjir bikin TPS sulit diakses, sementara di Tembalang, Pedurungan naik gara-gara deket komunitas dan fasilitas cenderung lebih baik.
Pewawancara	Apa rekomendasi PPUA untuk meningkatkan partisipasi disabilitas di Pemilu 2029?
Informan	Banyak sih mas kalo dari kita itu rekomendasinya perbanyak kuota disabilitas di SDM KPU, e-voting buat tunanetra, dan sosialisasi dini pake digital tools. Kita saranin KPU rombak PKPU biar TPS 100% ramah, plus pelatihan wajib sensitivitas disabilitas buat petugas, biar gak ada lagi masalah lapangan kayak kurang paham pendampingan.
Pewawancara	Bagaimana PPUA melihat peluang inovasi seperti e-voting untuk masa depan?

Informan	E-voting peluang besar buat tunanetra dan fisik, Mas, bisa akses dari rumah tanpa takut jarak. Tapi butuh uji coba di Semarang biar inklusif, jangan sampai malah bikin gap digital bagi yang gak punya gadget atau akses internet stabil.
Pewawancara	Terakhir Pak, apakah ada data dari PPUA yang bisa saya akses?
Informan	Oh ada mas. Yaa, kita punya laporan evaluasi partisipasi dan infografis tren. Nanti saya kirim via email. Ada juga data survey anggota kita soal hambatan TPS, termasuk kasus-kasus spesifik di Semarang yang mungkin bisa nambah temuan skripsi masnya.
Pewawancara	Terima kasih banyak, Bapak Mahmud Fasa, atas waktu dan penjelasan yang sangat berharga ini. Insight dari Bapak akan sangat membantu dalam pengembangan skripsi saya. Jika ada hal yang perlu diklarifikasi atau data tambahan yang Bapak inginkan saya konfirmasi, saya siap untuk menghubungi kembali. Semoga kerjasama ini bermanfaat bagi kita semua. Selamat siang, Bapak.
Informan	Sama-sama, Mas Fauzan. Senang bisa bantu. Semoga skripsinya lancar yaa
Pewawancara	Terima kasih Pak Mahmud

Lampiran 19. Transkrip Wawancara dengan Karnadi – Tuna Netra

Transkrip Wawancara

Nama Narasumber : Karnadi
Usia : 47 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Ketunaan : Tuna Netra
Alamat Domisili : Kelurahan Sendangmulyo
Tanggal Wawancara : Kamis, 5 Februari 2026
Lokasi Wawancara : Offline di Kediaman Informan
Durasi Wawancara : 24 menit

Pewawancara	Selamat siang, Pak Karnadi. Terima kasih banyak atas kesediaan Bapak untuk diwawancarai. Saya Fauzan Haidar Ramadan, mahasiswa Ilmu Pemerintahan FISIP Undip, sedang menyusun skripsi tentang partisipasi pemilih disabilitas di Pemilu 2019 dan 2024 di Semarang. Wawancara ini buat mengumpulkan cerita langsung dari Bapak. Boleh saya rekam buat analisis? Semua rahasia dan cuma buat skripsi. Kalau siap, kita mulai ya.
Informan	Ya, siang juga, Mas Fauzan. Saya Karnadi, umur 47, tinggal di Sendangmulyo. Saya tunanetra sejak lahir. Silahkan rekam saja, gak apa-apa mas.

Pewawancara	Bisakah Bapak ceritakan pengalaman partisipasi Bapak di Pemilu 2019 dan 2024? Apa perbedaan utamanya dari segi aksesibilitas TPS?
Informan	Ya, Mas, di 2019 saya ikut milih, tapi susah banget. Saya harus minta tolong anak buat nganter ke TPS di Tembalang. Pas sampe sana, gak ada braille buat surat suara, jadi saya cuma bisa percaya sama pendamping. Petugas KPPSnya baik sih, tapi mereka kayaknya gak terlatih, soalnya mereka bingung gimana bantu saya tanpa bocorin pilihan. Akhirnya, saya milih tapi rasanya gak mandiri. Di 2024, beda jauh ada ABT, alat bantu tunanetra, meskipun gak sempurna, tapi saya bisa ngeraba sendiri. TPSnya juga lebih ramah, ada jalur khusus, dan petugasnya lebih paham gara-gara pelatihan kayaknya. Jadi, aksesibilitas naik banget, Mas, meskipun masih ada overcrowding yang bikin ribet.
Pewawancara	Apa hambatan terbesar yang Bapak hadapi di kedua pemilu, baik fisik, informasi, atau sosial?
Informan	Informasinya juga kurang, saya gak tahu calon-calon lewat apa, karena sosialisasi KPU cuma lewat radio, tapi gak ada audio deskripsi khusus. Sosialnya, stigma dari tetangga. Mereka bilang, "Ngapain milih, susah aja." Jujur sebenarnya agak sakit hari sih, tapi ya gapapa. Kalau di 2024, hambatan fisik menurut saya berkurang karena ada bidang miring di TPS, tapi informasi

	<p>masih agak susah karena beberapa website gak sepenuhnya aksesibel buat screen reader. Saya kan pasitu juga ikut lihat proses penghitungan. Sosialnya mendingan, keluarga lebih dukung setelah ada kampanye dari komunitas. Ada itu pernah yang sosialisasi, kalau ga salah Pertuni.</p>
Pewawancara	<p>Bagaimana pendampingan memengaruhi partisipasi Bapak? Apakah Bapak merasa lebih mandiri di 2024?</p>
Informan	<p>Pendampingan itu krusial banget, Mas. Di 2019, saya pakai anak sebagai pendamping, tapi rasanya gak rahasia, soalnya dia harus baca surat suara buat saya. Ada form C4 buat kerahasiaan, tapi petugasnya gak jelasin dengan baik. Di 2024, pendamping dari KPPS lebih profesional, mereka paham aturan, dan dengan ABT, saya bisa lebih mandiri cuma butuh bantuan minimal. Jadi, ya, merasa lebih mandiri, tapi tetep butuh pendampingan buat yang tunanetra total kayak saya.</p>
Pewawancara	<p>Menurut Bapak, apa faktor utama yang memengaruhi partisipasi pemilih disabilitas seperti Bapak di Pemilu 2019 dan 2024?</p>
Informan	<p>Faktor utamanya aksesibilitas TPS dan sosialisasi, Mas. Di 2019, faktor negatif kayak pandemi awal bikin kita takut keluar, plus stigma keluarga yang gak dukung. Sosialisasi KPU kurang, gak ada info braille. Di 2024, faktor positifnya kesadaran naik gara-gara relawan dari komunitas, dan KPU lebih baik sosialisasinya lewat forum. Tapi, petugas lapangan masih bermasalah. Banyak</p>

	<p>yang gak sensitif, kayak gak paham gimana bantu tanpa merendahkan. Ya saya lihat dari pengalaman saya, stigma sosial di Tembalang masih ada, tapi berkurang karena kampanye online.</p>
Pewawancara	<p>Dari pengalaman Bapak, apa perbedaan paling mencolok antara Pemilu 2019 dan 2024 dalam hal kemudahan memilih bagi penyandang disabilitas?</p>
Informan	<p>Perbedaan yang paling mencolok itu di template braille surat suaranya, Mas. Di 2019, braille-nya lusuh banget, kayak kertas bekas yang udah tipis dan robek-robek. Jari saya susah banget ngerabanya, apalagi di bawah lampu TPS yang remang-remang. Rasanya KPU gak serius, kayak asal-asalan. Saya akhirnya lebih banyak percaya sama pendamping. Tapi di 2024, braille-nya lebih baru, lebih tebal, dan lebih jelas. Saya bisa baca sendiri meski masih agak lambat. Jadi rasanya lebih dihargai sebagai pemilih, meskipun masih belum sempurna. Itu yang bikin saya lebih semangat datang ke TPS di 2024.</p>
Pewawancara	<p>Pada Pemilu baik 2019 maupun 2024 kita tahu khusus untuk Pemilihan Legislatif calonnya sangat banyak. Dari bapak, apakah ada kendala khusus soal template atau braille-nya itu?</p>
Informan	<p>Kalau saya pribadi kebetulan ada mas pengalaman soal braille ini. Di TPS saya itu, dua kali pemilu untuk braille DPRD</p>

	Kab/Kota itu tidak ada. Jadi tidak lengkap, saya jadi kesulitan nyoblosnya.
Pewawancara	Apa rekomendasi Bapak untuk meningkatkan partisipasi pemilih tunanetra di pemilu mendatang?
Informan	Rekomendasi saya, KPU harus bikin e-voting yang aksesibel screen reader, biar kita bisa milih dari rumah tanpa takut jarak. Latih petugas lebih intensif soal pendampingan, dan tambah sosialisasi braille atau audio dari awal. Di Semarang, alokasi anggaran buat TPS ramah difabel mungkin biar lebih inklusif.
Pewawancara	Terima kasih banyak, Pak Karnadi, atas waktu dan ceritanya. Ini sangat bantu skripsi saya. Kalau ada yang perlu diklarifikasi, saya hubungi lagi ya. Selamat siang, Pak.
Informan	Sama-sama Mas Fauzan

Lampiran 20. Transkrip Wawancara dengan Febri Eko Adrianto – Tuna Netra

Transkrip Wawancara

Nama Narasumber : Febri Eko Adrianto
Usia : 42 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Ketunaan : Tuna Netra
Alamat Domisili : Panggung Lor, Semarang Utara
Tanggal Wawancara : Kamis, 5 Februari 2026
Lokasi Wawancara : Offline di Kediaman Informan
Durasi Wawancara : 24 menit

Pewawancara	Selamat siang, Pak Febri Eko Adrianto. Terima kasih banyak atas kesediaan Bapak untuk diwawancarai. Saya Fauzan Haidar Ramadan, mahasiswa Ilmu Pemerintahan FISIP Undip. Saat ini saya sedang menyusun skripsi tentang partisipasi pemilih disabilitas di Pemilu 2019 dan 2024 di Semarang. Izin Pak, wawancara ini ditujukan untuk mengumpulkan cerita dan pengalaman langsung dari Bapak. Izin Pak, apakah boleh saya rekam buat analisis? Nanti semua aman soalnya untuk skripsi saja. Apakah bapak bersedia?
Informan	Ya mas, silahkan <i>mboten nopo-nopo</i> . Ya, perkenalkan saya Febri Eko Adrianto, biasa dipanggil Febri. Umur 42, tinggal di Semarang Utara di Panggung Lor. Saat ini saya mengajar di

	SLBN Semarang sebagai guru. Ini saya punya disabilitas tuna netra sejak saya lahir.
Pewawancara	Bisakah Bapak ceritakan pengalaman partisipasi Bapak di Pemilu 2019 dan 2024? Apa perbedaan utamanya dari segi aksesibilitas TPS?
Informan	Ya, Mas, di 2019 yang pas itu milih presiden saya ikut milih, tapi pas itu bener-bener susah. Saya harus minta tolong saudara buat nganter ke TPS di Panggung Lor. Pas sampe sana, template braille surat suaranya lusuh banget, kayak kertas bekas yang udah ketumpuk-tumpuk, sulit dibaca jari saya. Rasanya KPU gak serius, kayak asal-asalan aja. Akhirnya, saya milih tapi gak yakin pilihan saya bener, karena braille nya gak jelas. Nah kalau di Pemilu 2024, sedikit lebih baik. Template braille nya agak lebih mending, tapi tetep ada lusuhnya di beberapa tempat, dan petugas bilang stoknya terbatas. Kalau buat aksesibilitas TPSnya naik, ada jalur khusus, tapi agak penuh ya desak desakan masih bikin susah navigasi buat tunanetra kayak saya. Menurut saya, kayak braille yang lusuh ini bikin banyak teman-temen tunanetra males milih, soalnya rasanya gak dihargai sebagai pemilih.
Pewawancara	Kalau kondisi khusus, ditempat bapak apakah ada pengalaman khusus begitu? Mungkin boleh diceritakan Bapak!
Informan	Ya kalau dari saya sendiri, saya kan tinggal di daerah pesisir ya mas. Di sini sering banjir, apalagi kan pas itu musim hujan kan

	<p>ya. Tahu sendiri Pemilu kemarin (2024), itu deras-derasnya hujan. Saya agak kesulitan dalam mengakses karena ya banjir itu. Terus juga ada pengalaman yang kurang nyaman ya. Waktu pemilu 2019, template yang buat nyoblos itu ga ada yang DPR. Itu juga bukan hanya saya, teman saya yang sama (tuna netra) di daerah Tanah Mas juga tidak lengkap braillinya.</p>
Pewawancara	<p>Apa hambatan terbesar yang Bapak hadapi di kedua pemilu, baik fisik, informasi, atau sosial?</p>
Informan	<p>Hambatan terbesar itu ya template braille yang lusuh tadi, Mas. Di 2019, braillinya samar-samar, jari saya aja yang udah biasa baca susah ngebacanya, apalagi di TPS kan disusu-susu to. Terus TPS di tempat saya kan tu ada tangga kecil yang gak ada ram, jadi saya harus dibantu. Walau agak kesulitan, tapi saya masih bisa lah ya. Informasinya juga kurang, calon-calon gak ada deskripsi audio lengkap, dan petugas kurang sigap, mereka sering lambat bantu, kayak nunggu saya minta dulu, gak proaktif. Terus tetangga sering bilang kayak ya saya saya ini merepotkan saja. Kalau di 2024, lusuh braille masih ada, tapi informasi lebih baik lewat app, meski screen reader kadang suka error. Kalau secara sosialnya mendingan, keluarga lebih dukung setelah ada kampanye dari komunitas. Tapi petugas masih kurang sigap, Mas. Contohnya, pas saya minta bantuan baca</p>

	form, mereka kayak bingung dan malah nyuruh tunggu lama, bikin saya merasa nggak enak gitu jadi nunggu yang lain
Pewawancara	Bagaimana pendampingan memengaruhi partisipasi Bapak? Apakah Bapak merasa lebih mandiri di 2024?
Informan	Pendampingan itu penting, Mas, tapi di 2019 rasanya kayak kehilangan privasi. Saya pakai saudara, tapi dia harus baca surat suara karena braille-nya lusuh, jadi pilihan saya gak rahasia beneran. Petugas KPPS nya <i>gak</i> ngerti form C4 buat kerahasiaan, jadi asal-asalan aja. Di 2024, pendamping dari KPPS lebih profesional, mereka paham aturan, dan dengan braille yang agak lebih baik, saya bisa lebih mandiri cuma butuh bantuan minimal. Tapi tetep, pendampingan bikin saya merasa tergantung, meski sekarang ada ABT yang bantu. Temuan dari saya, pendampingan yang kurang sigap ini bikin partisipasi turun, soalnya banyak yang males ke TPS kalau petugas gak siap bantu dengan cepat dan hormat.
Pewawancara	Menurut Bapak, apa faktor utama yang memengaruhi partisipasi pemilih disabilitas seperti Bapak di Pemilu 2019 dan 2024?
	Faktor utamanya kualitas fasilitas kayak braille yang lusuh itu, Mas di 2019, itu bikin banyak temen tunanetra gak jadi milih karena merasa gak dihargai, kayak KPU gak serius. Sosialisasi KPU kurang, gak ada info audio yang mudah diakses, dan petugas kurang sigap banyak yang gak sensitif, kayak gak paham

	<p>gimana bantu tanpa ngerendahin. Pandemi awal bikin tambah susah, kita takut keluar. Di 2024, faktor positifnya sosialisasi lebih baik lewat forum, dan kesadaran keluarga naik. Tapi petugas masih bermasalah, banyak yang lambat tanggap, kayak nunggu kita minta dulu baru bantu. Temuan dari pengalaman saya, lusuh braille ini implikasinya besar, bikin turnout rendah dan stigma tambah kuat, soalnya rasanya pemilu gak adil buat kita, dan informasi pemilih masih gak ramah tunanetra, kayak app yang gak kompatibel screen reader, bikin kita ketinggalan <i>update</i> calon.</p>
Pewawancara	<p>Apa rekomendasi Bapak untuk meningkatkan partisipasi pemilih tunanetra di pemilu mendatang?</p>
Informan	<p>Rekomendasi saya, KPU harus pastiin template braille baru dan berkualitas, jangan lusuh lagi, biar kita bisa baca dengan jelas dan mandiri. Tambah sosialisasi audio digital dari awal, dan latih petugas supaya lebih sigap dan sensitif, biar gak ada lagi yang lambat bantu atau ngerendahin. Di Semarang, alokasi TPS ramah di semua kecamatan, termasuk yang rawan banjir kayak Semarang Utara, Genuk, Semarang Barat, atau Tugu, biar gak ada yang ketinggalan gara-gara banjir atau jarak. E-voting juga bagus, tapi pastiin aksesibel buat screen reader, dan informasi pemilih harus ramah tunanetra, kayak semua app wajib kompatibel voice-over.</p>

Pewawancara	Terima kasih banyak, Pak Febri Eko Adrianto, atas waktu dan ceritanya. Ini sangat bantu skripsi saya. Kalau ada yang perlu diklarifikasi, saya hubungi lagi ya. Selamat siang, Pak.
Informan	Sama-sama, Mas. Seneng bisa cerita. Semoga skripsinya lancar. Selamat siang.

Lampiran 21. Transkrip Wawancara dengan Pujiono – Tuna Daksa

Transkrip Wawancara

Nama Narasumber : Pujiono
 Usia : 51 tahun
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Ketunaan : Tuna Daksa
 Alamat Domisili : Jl. Teratai, Tambak Lorok
 Tanggal Wawancara : Senin, 9 Februari 2026
 Lokasi Wawancara : Kediaman Pujiono
 Durasi Wawancara : 37 menit

Pewawancara	Selamat pagi Pak Puji. Mohon maaf ini tiba-tiba saya datang.
Informan	Gapapa mas, saya juga sedang tidak ada kerjaan
Pewawancara	Nggih Pak, sebelumnya perkenalkan nama saya Fauzan Haidar Ramadan. Biasa dipanggil Fauzan Pak. Saya mahasiswa akhir S1 Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro. Izin Pak, maksud kedatangan saya kemari adalah untuk wawancara bapak terkait dengan partisipasi pemilih disabilitas. Apakah bapak bersedia untuk dapat wawancara dengan saya?
Informan	Silahkan mas, boleh-boleh. Apa yang bisa saya bantu
Pewawancara	Boleh dikenalkan diri terlebih dahulu Pak. Namanya siapa, kemudian tinggal di mana, dan disabilitasnya Pak

Informan	Nama saya Pujiono. Saya tinggal di Tambak Lorok. Saat ini saya usia 51 tahun. Saat ini saya sehari-hari bantu-bantu jahit.
Pewawancara	Pak Pujiono, bisa diceritakan sejak kapan Bapak mengikuti pemilu?
Informan	Kalau ikut pemilu itu sebenarnya sudah lama sekali ya, dari sebelum kondisi tubuh saya seperti sekarang. Dulu masih bisa jalan walaupun pelan, tetap datang ke TPS sendiri. Setelah pakai kursi roda pun saya tetap berusaha ikut, karena menurut saya ini hak sebagai warga negara. Jadi walaupun kondisi sudah berbeda, saya tidak pernah berniat untuk tidak ikut. Cuma memang sejak pakai kursi roda itu, tantangannya jadi beda. Bukan soal mau atau tidak mau ikut, tapi lebih ke bagaimana caranya saya bisa sampai ke TPS dengan kondisi lingkungan yang tidak selalu mendukung
Pewawancara	Bisa diceritakan pengalaman Bapak saat Pemilu 2019?
Informan	Pemilu 2019 itu saya ingat sekali karena perjalanannya cukup melelahkan. TPS-nya ada di balai RT, jaraknya sebenarnya tidak terlalu jauh dari rumah, tapi jalannya itu menanjak dan pavingnya tidak rata. Waktu itu saya diantar anak saya, dia yang dorong kursi roda dari rumah. Baru sampai setengah jalan saja sudah terasa berat, karena harus pelan-pelan supaya kursinya tidak miring. Sampai TPS itu rasanya sudah capek duluan sebelum nyoblos. Jadi pengalaman yang paling saya ingat bukan

	di dalam TPS, tapi justru perjalanan menuju ke sana yang rasanya perjuangan sekali
Pewawancara	Lalu bagaimana dengan pengalaman di dalam TPS saat itu?
Informan	Kalau di dalam TPS sebenarnya panitianya baik-baik. Begitu saya datang, langsung dibantu masuk, bahkan saya didahulukan. Bilik suaranya juga bisa dijangkau, tidak terlalu tinggi. Tapi tetap saja saya merasa tidak bisa melakukan semuanya sendiri. Dari awal masuk sampai selesai, selalu ada yang membantu mengatur posisi kursi roda saya. Jadi walaupun dilayani dengan baik, tetap ada perasaan bahwa saya tidak sepenuhnya mandiri seperti pemilih lain.
Pewawancara	Apakah pengalaman tersebut berbeda pada Pemilu 2024?
	Sejajurnya tidak banyak berbeda. TPS-nya masih di tempat yang sama, jalannya juga masih sama. Saya juga tetap harus diantar keluarga. Panitianya tetap ramah, membantu, bahkan lebih sigap. Tapi yang saya rasakan ya itu lagi, akses menuju TPS tidak berubah. Jadi pengalaman saya di 2024 rasanya seperti mengulang 2019. Tidak ada perubahan berarti yang membuat saya merasa lebih mudah atau lebih mandiri.
Pewawancara	Apakah Bapak merasa partisipasi di 2024 lebih mudah atau masih sama sulitnya dengan 2019? Tolong ceritakan contoh konkretnya.

	<p>Lebih mudah dibanding 2019, Mas, tapi masih susah. Di 2019, jalannya ke TPS di tempat saya itu becek parah gara-gara banjir rob, kursi roda saya hampir nyangkut, harus digendong anak sampe pintu TPS. Capeknya minta ampun. Di 2024, ada bidang miring di beberapa TPS, dan petugas langsung bantu angkat kursi roda. Contohnya teman saya yang di Semarang Barat, itu mereka KPPSnya sudah siapin papan kayu buat jalan kursi roda. Jadi perjalanannya lebih ringan, tapi kalau hujan deras tetap banjir, ya masih susah juga.</p>
Pewawancara	<p>Apakah Bapak pernah terpikir untuk tidak datang karena aksesnya sulit?</p>
Informan	<p>Pernah terpikir, apalagi kalau yang biasa bantu saya sedang tidak di rumah. Saya sempat berpikir, ‘apa tidak usah saja ya’, karena membayangkan jalannya saja sudah capek. Tapi akhirnya saya tetap berangkat, karena merasa kalau saya tidak datang, suara saya tidak terpakai. Jadi walaupun berat, tetap saya usahakan. Cuma ya itu, motivasi saya datang bukan karena aksesnya mudah, tapi karena kesadaran saya sendiri bahwa ini penting.</p>
Pewawancara	<p>Apakah Bapak mendapatkan sosialisasi khusus sebagai pemilih disabilitas</p>
Informan	<p>Seingat saya tidak ada yang khusus. Paling informasi soal pemilu itu saya dapat dari tetangga atau dari obrolan warga. Tidak pernah ada petugas yang datang khusus menjelaskan ke saya</p>

	sebagai penyandang disabilitas. Jadi saya ikut pemilu itu lebih karena tahu jadwalnya dari lingkungan sekitar, bukan karena ada pendekatan khusus.
Pewawancara	Bagaimana peran keluarga dalam membantu Bapak ikut pemilu?
Informan	Peran keluarga itu sangat besar. Tanpa mereka, saya tidak mungkin bisa ikut. Anak saya yang selalu mendorong kursi roda, mengantar dari rumah sampai TPS, lalu menunggu sampai saya selesai. Jadi sebenarnya saya bisa ikut pemilu itu bukan karena sistemnya sudah memudahkan saya, tapi karena ada keluarga yang membantu. Kalau tidak ada mereka, mungkin saya tidak bisa berpartisipasi
Pewawancara	Apakah Bapak merasa sudah diperlakukan setara sebagai pemilih?
Informan	Kalau dari sikap panitia, saya merasa dihargai dan dilayani dengan baik. Tapi kalau bicara soal kesetaraan secara keseluruhan, saya merasa belum sepenuhnya setara. Karena saya tidak bisa datang sendiri seperti pemilih lain. Saya masih harus bergantung pada orang lain dari awal sampai akhir.
Pewawancara	Apa harapan Bapak untuk pemilu ke depan?
Informan	Harapan saya sederhana, akses menuju TPS itu lebih diperhatikan. Mungkin TPS bisa ditempatkan di lokasi yang lebih mudah dijangkau, atau ada petugas yang bisa membantu menjemput pemilih seperti saya. Karena masalah terbesar itu

	bukan di dalam TPS, tapi di perjalanan menuju ke sana. Kalau aksesnya lebih mudah, saya yakin saya bisa lebih mandiri.
Pewawancara	Terima kasih banyak Pak Puji atas kesempatan yang telah diberikan. Maaf nggih Pak ini mengganggu waktunya
Informan	Ah nggak papa mas, aman saja.

Lampiran 22. Transkrip Wawancara dengan Monfaidah– Tuna Daksa

Transkrip Wawancara

Nama Narasumber : Monfaidah
Usia : 48
Jenis Kelamin : Perempuan
Ketunaan : Tuna Daksa
Alamat Domisili : Jl. Blancir, Kelurahan Plamongansari, Kecamatan Pedurungan
Tanggal Wawancara : Senin, 9 Februari 2026
Lokasi Wawancara : Luring di kediaman informan
Durasi Wawancara : 27 menit

Pewawancara	Selamat sore Bu. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Perkenalkan, saya Fauzan Haidar Ramadan mahasiswa Universitas Diponegoro. Izin bu, saya sedang melakukan penelitian terkait dengan partisipasi pemilih disabilitas di Kota Semarang.
Informan	Ya mas selamat sore juga. Silahkan mas, langsung saja.
Pewawancara	Baik Ibu, sebagai permulaan boleh diperkenalkan dirinya terlebih dahulu.
Informan	Perkenalkan, saya Monfaidah. Biasa dipanggil Bu Faidah. Saya saat ini 48 tahun. Saya tinggalnya di Jalan Blancir di Kelurahan Plamongansari.

Pewawancara	Bu Monfaidah, bisa diceritakan pengalaman Ibu mengikuti pemilu?
Informan	Saya selalu berusaha ikut pemilu, baik yang 2019 maupun 2024. Bagi saya, ikut memilih itu seperti kewajiban moral sebagai warga negara. Walaupun kondisi fisik saya tidak memungkinkan untuk berjalan normal, saya tetap ingin hadir langsung di TPS. Rasanya ada kepuasan tersendiri kalau bisa datang dan mencoblos sendiri, meskipun prosesnya bagi saya tidak sederhana pemilih lain.
Pewawancara	Apa yang paling Ibu rasakan sebagai tantangan saat akan ke TPS?
Informan	Yang paling terasa itu soal akses jalan dari rumah ke TPS. Rumah saya ada di gang yang cukup sempit, dan permukaan jalannya tidak rata. Kalau habis hujan, makin sulit karena licin. Saya biasanya harus minta tolong suami untuk mendampingi. Jadi sebelum sampai TPS saja, saya sudah merasa harus menyiapkan tenaga dan pikiran dulu. Kadang itu yang membuat saya merasa bahwa untuk ikut pemilu, saya harus berjuang lebih dibanding yang lain.
Pewawancara	Bagaimana situasi di TPS saat Ibu sampai di sana?
Informan	Kalau di TPS, alhamdulillah panitianya selalu membantu. Saya disambut dengan baik, dipersilakan duduk, bahkan didahulukan. Tapi tetap saja, saya merasa belum bisa sepenuhnya mandiri.

	Dari datang sampai selesai, selalu ada yang membantu mengarahkan. Walaupun niatnya baik, tetap ada perasaan bahwa saya berbeda dan membutuhkan bantuan terus menerus.
Pewawancara	Apakah ada perbedaan pengalaman antara Pemilu 2019 dan 2024?
Informan	Kalau dari segi pelayanan panitia, saya rasa 2024 lebih sigap. Mereka lebih cepat tanggap melihat kondisi saya. Tapi kalau dari sisi akses menuju TPS, rasanya tidak banyak berubah. Lokasinya masih sama, jalannya juga masih sama. Jadi pengalaman saya tetap menghadapi tantangan yang sama seperti sebelumnya.
Pewawancara	Apakah Ibu pernah berpikir untuk tidak datang karena kesulitan tersebut?
Informan	Pernah terlintas, apalagi kalau badan lagi kurang enak. Saya sempat berpikir, 'apa tidak diwakilkan saja ya'. Tapi akhirnya saya tetap datang, karena merasa kalau saya tidak hadir sendiri, rasanya kurang puas. Saya ingin merasakan sendiri proses memilih itu
Pewawancara	Apakah Ibu pernah mendapatkan sosialisasi khusus dari penyelenggara pemilu?
Informan	Tidak pernah ada yang khusus datang ke rumah. Saya tahu jadwal pemilu dari pengumuman warga dan obrolan tetangga. Tidak ada penjelasan khusus untuk penyandang disabilitas

	seperti saya, jadi saya mengikuti seperti pemilih pada umumnya saja.
Pewawancara	Bagaimana peran keluarga dalam membantu Ibu?
Informan	Peran keluarga sangat penting. Suami saya selalu mendampingi dari rumah sampai TPS. Jadi sebenarnya saya bisa ikut pemilu karena ada dukungan keluarga. Kalau sendirian, saya mungkin kesulitan. Ini yang membuat saya merasa bahwa partisipasi saya masih sangat bergantung pada orang lain.
Pewawancara	Menurut Ibu, apa yang perlu diperbaiki?
Informan	Menurut saya, akses menuju TPS perlu diperhatikan. Tidak semua penyandang disabilitas tinggal di tempat yang jalannya mudah. Mungkin bisa dipikirkan TPS yang lebih dekat atau ada bantuan penjemputan. Karena kendala terbesar itu justru sebelum sampai TPS.
Pewawancara	Bagaimana perasaan Ibu setelah mengikuti pemilu?
Informan	Saya senang bisa tetap ikut, tapi juga merasa bahwa prosesnya masih cukup melelahkan bagi saya. Harapannya ke depan, saya bisa ikut pemilu tanpa harus merasa ini adalah perjuangan yang berat setiap lima tahun sekali

Lampiran 23. Transkrip Wawancara dengan Riyadi – Tuna Daksa

Transkrip Wawancara

Nama Narasumber : Riyadi
Usia : 52
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Ketunaan : Tuna Daksa
Alamat Domisili : Candi Stoom, Kelurahan Wonotingal, Kecamatan Candisari, Kota Semarang
Tanggal Wawancara : Senin, 9 Februari 2026
Lokasi Wawancara : Luring di kediaman informan
Durasi Wawancara : 50 menit

Pewawancara	Pak Riyadi, bisa diceritakan bagaimana pengalaman Bapak mengikuti Pemilu 2019 dan 2024?
Informan	Kalau ikut pemilu saya selalu ikut, baik 2019 maupun 2024. Tapi jujur saja, buat saya itu bukan hal yang sederhana. Rumah saya ini kan di Candi Stoom, jalannya curam sekali. Kalau orang sehat mungkin masih bisa jalan kaki pelan-pelan, tapi buat saya yang kondisi kaki tidak kuat, itu hampir mustahil. Jadi setiap mau ke TPS, saya harus mikir dulu, siap nggak tenaganya, siap nggak ongkosnya. Karena buat sampai ke TPS saja, saya sering harus naik ojek.

Pewawancara	Jadi Bapak harus mengeluarkan biaya sendiri untuk bisa memilih?
Informan	Ya, itu yang kadang bikin saya merasa berat. TPS memang tidak terlalu jauh kalau dilihat di peta, tapi karena jalannya menanjak tajam, saya tidak bisa turun sendiri pakai kursi roda. Waktu 2019 saya sempat dipapah tetangga, tapi itu juga susah karena jalannya sempit dan ramai. Akhirnya 2024 saya pilih naik ojek. Saya harus bayar sendiri, walaupun jaraknya dekat. Jadi untuk bisa menggunakan hak pilih, saya harus mengeluarkan uang. Bagi saya itu terasa sekali, karena tidak semua orang harus melakukan itu.”
Pewawancara	Setelah sampai di TPS, bagaimana pengalaman Bapak?
Informan	Kalau sudah sampai TPS, sebenarnya relatif aman. Panitianya membantu, bahkan langsung mendahulukan saya. Tapi yang tidak terlihat orang adalah perjuangan sebelum sampai ke situ. Orang mungkin melihat saya datang dan mencoblos seperti biasa, tapi mereka tidak tahu saya harus bayar ojek dulu dan menunggu pengemudi yang mau masuk ke gang sempit itu.
Pewawancara	Apakah ada perbedaan antara Pemilu 2019 dan 2024?
Informan	Kalau dari sisi pelayanan di TPS, mungkin 2024 lebih teratur. Panitianya lebih siap membantu. Tapi dari sisi akses menuju TPS, tidak ada perubahan sama sekali. Lokasinya tetap di tempat yang sama, jalannya juga tetap curam. Jadi secara umum,

	tantangan yang saya hadapi masih sama. Bahkan mungkin lebih terasa karena sekarang saya lebih sering sendiri.”
Pewawancara	Apakah Bapak pernah berpikir untuk tidak datang karena harus mengeluarkan biaya?
Informan	Pernah, apalagi kalau kondisi ekonomi lagi pas-pasan. Saya sempat berpikir, ‘masa cuma buat nyoblos harus bayar ojek’. Tapi di sisi lain saya merasa kalau saya tidak datang, suara saya hilang. Jadi akhirnya tetap saya usahakan. Tapi tetap saja ada rasa tidak adil, karena untuk menggunakan hak yang sama, saya harus berkorban lebih.
Pewawancara	Apakah pernah ada bantuan dari penyelenggara atau pihak lain?
Informan	Sejauh ini belum pernah ada bantuan khusus. Tidak ada yang menawarkan jemputan atau fasilitas transportasi. Semua saya atur sendiri. Kalau ada tetangga yang kebetulan turun, saya numpang. Kalau tidak, ya naik ojek. Jadi semuanya tergantung situasi
Pewawancara	Bagaimana perasaan Bapak sebagai pemilih penyandang disabilitas dalam kondisi seperti ini?
Informan	Rasanya campur aduk. Di satu sisi saya bangga masih bisa ikut pemilu. Di sisi lain saya merasa perjuangan saya lebih berat dari orang lain. Saya ingin diperlakukan setara, tapi kenyataannya saya harus mengeluarkan biaya tambahan dan tenaga lebih hanya untuk sampai ke TPS.”

Pewawancara	Menurut Bapak, apa solusi yang sebaiknya dilakukan?
Informan	“Kalau bisa TPS ditempatkan di lokasi yang lebih mudah diakses, atau ada layanan antar jemput bagi pemilih disabilitas di daerah yang jalannya ekstrem seperti di sini. Karena masalah kami bukan niat untuk memilih, tapi akses dan kondisi wilayah. Kalau itu diperhatikan, saya yakin partisipasi kami bisa lebih maksimal.

Lampiran 24. Transkrip Wawancara dengan Suwanto – Tuna Daksa

Transkrip Wawancara

Nama Narasumber : Suwanto
Usia : 44 tahun
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Ketunaan : Tuna Daksa
Alamat Domisili : Jl. Jangli Rt 08 RW 02 Kelurahan Jangli
Kecamatan Tembalang
Tanggal Wawancara : Kamis, 12 Februari 2026
Lokasi Wawancara : Luring di kediaman informan
Durasi Wawancara : 33 menit

Pewawancara	Pak Wanto, bagaimana pengalaman Bapak mengikuti Pemilu 2019 dan 2024?
Informan	Kalau saya pribadi, tetap ikut dua-duanya. Tapi saya terus terang, saya ini tipe orang yang tidak mau cuma diam. Saya lihat memang ada perbaikan kecil di 2024 dibanding 2019, terutama dari sisi sikap panitia yang lebih ramah. Tapi kalau bicara akses secara menyeluruh, menurut saya masih jauh dari kata ideal. Kita ini sering dianggap sudah difasilitasi hanya karena ada jalur kursi roda di TPS, padahal persoalannya tidak sesederhana itu.
Pewawancara	Bisa diceritakan pengalaman pribadi Bapak?

Informan	Rumah saya di Jangli itu kan daerahnya naik turun juga, walaupun tidak seterjal Candi. Saya masih bisa jalan pelan-pelan, tapi kalau harus antre lama atau berdiri lama, itu berat. Di 2019 saya sempat menunggu cukup lama karena antreannya panjang. Tidak ada sistem prioritas yang jelas. Saya tidak mau langsung minta didahulukan, karena kadang orang juga tidak peka. Jadi ya saya berdiri saja, walaupun kaki saya sudah terasa sakit
Pewawancara	Bagaimana dengan Pemilu 2024?
Informan	Yaa kalau 2024 sedikit lebih baik. Panitia lebih cepat menawarkan kursi. Tapi lagi-lagi itu tergantung individu panitia. Kalau panitianya peka, ya dilayani baik. Kalau tidak, ya kita harus inisiatif sendiri. Artinya sistemnya belum otomatis inklusif
Pewawancara	Bapak tadi menyebut pengalaman teman-teman difabel. Bisa diceritakan?
Informan	Saya punya beberapa teman sesama difabel di sekitar Tembalang. Ada yang pakai kursi roda, ada yang tongkat. Nah, masalah mereka justru lebih berat. Ada teman saya yang rumahnya di gang sempit, harus dibantu dua orang untuk keluar. Waktu 2019 dia hampir tidak jadi memilih karena tidak ada yang bisa mengantar. Di 2024 dia akhirnya datang, tapi tetap harus bergantung pada keluarga. Jadi partisipasi itu bukan cuma soal niat, tapi soal apakah sistem memudahkan atau tidak

Pewawancara	Apakah kondisi wilayah berpengaruh besar?
Informan	Sangat berpengaruh. Kota Semarang ini kan topografinya berbukit. Banyak TPS ditempatkan di balai warga atau rumah ketua RT yang akses jalannya tidak rata. Jadi meskipun di dalam TPS sudah ada jalur landai, tapi perjalanan menuju TPS itu yang sering tidak diperhitungkan.
Pewawancara	Dari pengalaman Bapak/Ibu, apa perbedaan paling mencolok antara Pemilu 2019 dan 2024 dalam hal kemudahan memilih bagi penyandang disabilitas?
Informan	Kalau dibandingin, perbedaan paling mencolok itu di keseluruhan ‘perhatian’ dari penyelenggara, Mas. Di 2019, rasanya kami disabilitas seperti nomor dua braille lusuh, petugas gak siap, akses TPS susah, apalagi di daerah banjir kayak Semarang Utara dan Tugu. Di 2024, ada perbaikan nyata: braille lebih baik, petugas lebih sigap, dan sosialisasi lebih ramah. Saya merasa lebih dianggap sebagai pemilih yang punya hak sama, bukan cuma ‘kasus khusus’. Tapi ya, masih ada kekurangan, terutama di pinggiran. Secara keseluruhan, 2024 jauh lebih mudah dibanding 2019
Pewawancara	Apa hambatan terbesar yang bapak rasakan waktu pemilu 2019
Informan	Hambatan terbesar di 2019 itu akses fisik, Mas. TPS di sekolah deket rumah, tapi ada tangga dan gak ada ram, jadi saya harus digendong anak

Pewawancara	Bagaimana menurut Bapak soal pendataan pemilih disabilitas?
Informan	Pendataan itu ada, tapi saya tidak yakin detailnya sampai pada kebutuhan masing-masing. Misalnya, apakah panitia tahu siapa saja yang butuh bantuan khusus atau siapa yang tinggal di daerah sulit. Kalau pendataan itu hanya angka di DPT tanpa tindak lanjut, ya tidak cukup.
Pewawancara	Bagaimana tingkat kesadaran politik teman-teman difabel?
Informan	Kesadaran ada. Jangan salah. Banyak teman saya yang sangat peduli politik. Tapi kadang mereka malas datang bukan karena tidak peduli, tapi karena aksesnya menyulitkan. Kalau setiap lima tahun harus merasa seperti sedang 'berjuang' hanya untuk mencoblos, ya wajar kalau motivasi turun.
Pewawancara	Apakah Bapak merasa setara sebagai pemilih?
Informan	Secara hukum setara. Tapi secara praktik belum sepenuhnya. Kesetaraan itu bukan hanya diberi hak, tapi juga diberi kemudahan yang proporsional sesuai kebutuhan. Kalau orang lain bisa datang dengan mudah, sementara kami harus mencari bantuan, itu berarti masih ada ketimpangan.
Pewawancara	Apa evaluasi Bapak dari dua pemilu tersebut?
Informan	2019 itu masih banyak yang belum peka. 2024 ada perbaikan dari sisi sikap pelayanan. Tapi perubahan struktural belum terasa signifikan. Akses geografis masih jadi masalah. Sosialisasi khusus difabel juga belum maksimal.

Pewawancara	Apa rekomendasi Bapak ke depan?
Informan	Pertama, pendataan pemilih disabilitas harus benar-benar dimanfaatkan untuk merancang pelayanan. Kedua, TPS sebaiknya mempertimbangkan kondisi wilayah. Ketiga, ada sistem prioritas yang jelas dan tidak membuat kami harus meminta sendiri. Dan kalau bisa, ada layanan jemput bagi difabel yang kesulitan akses.
Pewawancara	Terakhir, bagaimana Bapak memaknai partisipasi difabel dalam demokrasi?
Informan	Partisipasi itu bukan soal belas kasihan. Ini soal hak. Kami tidak minta perlakuan istimewa, kami minta sistem yang adil. Kalau demokrasi ingin disebut inklusif, maka akses bagi difabel itu bukan tambahan, tapi bagian dari kewajiban.

Lampiran 25. Transkrip Wawancara dengan Alip Widyanto – Tuna Daksa

Transkrip Wawancara

Nama Narasumber : Alip Widyanto
Usia : 49 tahun
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Ketunaan : Tuna Daksa
Alamat Domisili : Karangrejo RT 02 RW 03 Tinjomoyo,
Banyumanik
Tanggal Wawancara : Kamis, 12 Februari 2026
Lokasi Wawancara : Bengkel Compac
Durasi Wawancara :

Pewawancara	Pak Alip, bagaimana Bapak memaknai partisipasi dalam pemilu sebagai penyandang disabilitas?
Informan	Bagi saya, pemilu itu bukan sekadar datang mencoblos lalu selesai. Itu simbol bahwa saya diakui sebagai warga negara yang setara. Walaupun kondisi fisik saya tidak seperti kebanyakan orang, saya tetap punya hak yang sama. Justru mungkin karena kondisi saya berbeda, saya merasa harus lebih menunjukkan bahwa saya tetap hadir dalam proses demokrasi. Jadi setiap pemilu, baik 2019 maupun 2024, saya selalu berusaha hadir secara langsung di TPS.
Pewawancara	Bisa Bapak ceritakan pengalaman Pemilu 2019?

Informan	Pemilu 2019 itu cukup melelahkan secara fisik. Postur tubuh saya memang kecil dan ada kelainan, jadi berdiri lama itu membuat cepat lelah. Waktu itu antrean cukup panjang. Saya berdiri hampir 30 menit sebelum dipanggil. Tidak ada kursi khusus atau prioritas waktu itu. Saya tidak enak juga kalau harus meminta didahulukan, karena secara kasat mata saya terlihat seperti orang biasa, hanya lebih kecil. Jadi banyak orang mungkin tidak menyadari kondisi saya. Akhirnya saya tahan saja, walaupun kaki sudah terasa pegal.
Pewawancara	Bagaimana dengan Pemilu 2024?
Informan	Di 2024 saya merasa ada sedikit perubahan. Panitia lebih sigap menawarkan kursi saat melihat saya mulai terlihat lelah. Tapi itu pun setelah saya duduk sendiri di pinggir. Artinya, belum ada mekanisme sistematis yang mendeteksi kebutuhan pemilih seperti saya. Perubahannya lebih pada sensitivitas individu panitia, bukan pada sistemnya.
Pewawancara	Bagaimana akses menuju TPS di Tinjomoyo, di tempat anda?
Informan	Wilayah Tinjomoyo ini sebagian berbukit, tapi TPS saya relatif di area yang cukup datar. Jadi akses jalan bukan masalah besar. Tantangan saya lebih pada tubuh. Saya kan kecil ya mas, jadi buat ke sana saya naik motor modifikasi saya. Tapi saya harus barengan sama adek saya. Terus itu, ada selokan yang cukup lebar. Jadi itu juga saya jadi kesulitan.

Pewawancara	Apakah pernah ada kendala administratif?
Informan	Untuk administrasi tidak ada kendala berarti. Nama saya selalu terdaftar di DPT baik 2019 maupun 2024. Proses pengecekan identitas juga lancar. Jadi dari sisi administratif saya merasa terakomodasi.”
Pewawancara	Bagaimana pengalaman saat mencoblos?
Informan	Nah ini. Jujur saya sangat kesulitan. Kan biliknya tinggi, jadi saya nggak sampai ke atas. Jadi sama petugas diturunkan busa sama pakunya. Tapi ya jadi kelihatan saya milihnya. Teruskan surat suaranya besar. Itu juga saya sangat kesulitan. Mana petugasnya ga bantu, dan terkesan cuek
Pewawancara	Apa yang membuat Bapak tetap konsisten ikut pemilu?
Informan	Saya percaya bahwa demokrasi itu harus diisi oleh semua warga, termasuk kami yang memiliki keterbatasan fisik. Kalau saya tidak datang, berarti saya menyerahkan keputusan sepenuhnya pada orang lain. Itu yang tidak saya inginkan
Pewawancara	Apakah Bapak merasa sudah setara dalam proses pemilu?
Informan	Secara formal setara, karena hak saya diakui. Tapi secara praktik, belum tentu sepenuhnya setara. Kesetaraan itu bukan hanya soal boleh memilih, tapi apakah sistemnya benar-benar mempertimbangkan variasi kondisi pemilih
Pewawancara	Jika dibandingkan secara menyeluruh, apa evaluasi Bapak?

Informan	Perubahan antara 2019 dan 2024 menurut saya lebih pada aspek pelayanan, bukan pada struktur. Pelayanan lebih ramah, tapi belum ada kebijakan khusus untuk mendeteksi kebutuhan pemilih dengan disabilitas yang tidak terlihat. Jadi kemajuan ada, tapi masih di level interpersona
Pewawancara	Apa harapan Bapak untuk pemilu berikutnya?
Informan	Saya berharap ada pendekatan yang lebih inklusif, misalnya pendataan yang lebih detail soal kondisi pemilih, sehingga panitia bisa mengantisipasi kebutuhan tanpa harus menunggu pemilih meminta. Inklusivitas itu bukan soal belas kasihan, tapi soal desain sistem yang mempertimbangkan keberagaman.

Lampiran 26. Transkrip Wawancara dengan Inti Hayah – Tuna Wicara & Tuna Rungu

Transkrip Wawancara

Nama Narasumber : Inti Hayah
Usia : 55 tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
Ketunaan : Tuna Rungu & Wicara
Alamat Domisili : Mangkang Kulon, Kecamatan Tugu
Tanggal Wawancara : Kamis, 5 Februari 2026
Lokasi Wawancara : SLBN Semarang
Durasi Wawancara : 45 menit

Pewawancara	Ibu Inti, bagaimana pengalaman Ibu mengikuti Pemilu 2019?
Informan	Saya ikut pemilu 2019. Saya datang ke TPS bersama keluarga. Kendala pertama bagi saya bukan soal jalan atau lokasi, tetapi komunikasi. Saya tidak bisa mendengar panggilan nama saya. Waktu itu saya hanya melihat orang-orang maju satu per satu. Saya harus terus memperhatikan gerakan panitia. Kalau tidak ada keluarga yang memberi tahu dengan isyarat, saya tidak tahu kapan giliran saya.
Pewawancara	Apa yang paling sulit saat berada di TPS?
Informan	Yang paling sulit adalah memahami instruksi. Panitia menjelaskan sesuatu dengan suara, tetapi saya tidak mendengar.

	Kadang mereka berbicara sambil melihat ke arah lain, jadi saya tidak bisa membaca gerak bibir. Saya merasa bingung dan tidak enak karena harus terus bertanya melalui keluarga. Saya ingin bisa mengerti sendiri tanpa selalu bergantung.
Pewawancara	Apakah Ibu selalu didampingi saat memilih?
Informan	Iya, saya selalu didampingi keluarga. Tanpa pendamping, saya tidak yakin bisa mengikuti proses dengan lancar. Saya khawatir salah prosedur karena tidak mendengar penjelasan. Walaupun panitia baik, tapi mereka tidak menggunakan bahasa isyarat. Jadi saya merasa harus bergantung pada keluarga untuk menerjemahkan situasi
Pewawancara	Apakah ada perbedaan pengalaman antara Pemilu 2019 dan 2024?
Informan	Pada 2024, panitia terlihat lebih sabar dan mencoba berkomunikasi dengan gerakan tangan sederhana. Tapi tetap saja tidak ada yang benar-benar bisa bahasa isyarat. Saya tetap tidak bisa mendengar panggilan nama. Saya hanya melihat suasana sekitar dan menunggu diberi tanda oleh keluarga. Jadi secara umum, kendalanya masih sama.
Pewawancara	Dari pengalaman Ibu, apa perbedaan paling mencolok antara Pemilu 2019 dan 2024 dalam hal kemudahan memilih bagi penyandang disabilitas?

Informan	Yang paling mencolok buat saya itu soal komunikasi dengan petugas, Mas. Di 2019, petugas banyak yang gak paham isyarat, mereka cuma ngomong biasa dan nunjuk-nunjuk. Saya bingung banget, harus nunggu keluarga yang nerjemahin. Rasanya lama dan malu. Di 2024, ada juru bahasa isyarat di beberapa TPS, dan petugasnya lebih sigap mereka sudah pakai gerakan sederhana dan tulisan di kertas. Jadi prosesnya lebih cepat dan saya merasa lebih dihargai. Tapi tetap, di TPS pinggiran kayak Tugu masih kurang, kadang juru bahasanya cuma satu orang dan sibuk.
Pewawancara	Apakah Ibu pernah mendapat sosialisasi khusus terkait pemilu?
Informan	Tidak pernah ada sosialisasi khusus dengan bahasa isyarat. Informasi pemilu saya tahu dari keluarga atau dari melihat spanduk. Tidak ada penjelasan langsung yang bisa saya pahami tanpa bantuan orang lain.
Pewawancara	Bagaimana perasaan Ibu saat mengikuti pemilu?
Informan	Saya senang bisa tetap ikut memilih. Tapi saya sering merasa bingung dan cemas karena takut salah prosedur. Saya tidak bisa mendengar pengumuman, tidak tahu kalau ada perubahan aturan di TPS. Saya hanya mengikuti arahan dari orang lain.
Pewawancara	Apakah pernah ada situasi yang membuat Ibu merasa tidak nyaman?
Informan	Pernah saat 2019, saya tidak tahu nama saya sudah dipanggil. Ternyata sudah lewat beberapa orang. Saya baru maju setelah

	diberi tahu keluarga. Saat itu saya merasa malu karena seperti menghambat antrean. Padahal saya memang tidak mendengar.
Pewawancara	Apakah Ibu merasa sudah bisa memilih secara mandiri?
Informan	Belum sepenuhnya mandiri. Saya bisa mencoblos sendiri di bilik suara, tapi seluruh proses sebelum itu masih tergantung pada orang lain. Tanpa pendamping, saya tidak yakin bisa mengikuti alur dengan benar.
Pewawancara	Apa harapan Ibu untuk pemilu berikutnya?
Informan	Saya berharap ada petugas yang bisa bahasa isyarat atau setidaknya ada papan petunjuk yang jelas dengan tulisan besar. Kalau ada layar atau nomor antrean yang terlihat, saya bisa mengikuti tanpa harus mendengar. Saya ingin bisa datang dan memahami proses tanpa selalu bergantung pada keluarga.

Lampiran 27. Transkrip Wawancara dengan Tutik Susilowati – Tuna Wicara & Tuna Rungu

Transkrip Wawancara

Nama Narasumber : Tutik Susilowati
Usia : 33 tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
Ketunaan : Tuna Rungu & Wicara
Alamat Domisili : Nongkosawit, Gunungpati
Tanggal Wawancara : Kamis, 5 Februari 2026
Lokasi Wawancara : SLBN Semarang
Durasi Wawancara : 67 menit

Pewawancara	Mbak Tutik, bagaimana pengalaman pertama Mbak mengikuti Pemilu 2019 sebagai pemilih disabilitas?
Informan	Pemilu 2019 itu pengalaman yang cukup campur aduk buat saya. Saya datang ke TPS sendiri karena jaraknya dekat dari rumah. Secara fisik tidak ada masalah, tapi kendalanya tetap di komunikasi. Saya tidak bisa mendengar panggilan nama. Jadi saya harus terus melihat papan daftar hadir dan memperhatikan gerakan orang. Kadang saya takut kalau nama saya sudah dipanggil tapi saya tidak sadar.
Pewawancara	Bagaimana Mbak mendapatkan informasi soal pemilu?

Informan	Saya lebih banyak mendapat informasi dari media sosial dan grup WhatsApp keluarga. Tidak pernah ada sosialisasi khusus yang menggunakan bahasa isyarat. Informasi resmi biasanya dalam bentuk video, tapi jarang ada subtitle yang jelas. Jadi saya sering harus membaca berita sendiri untuk memahami jadwal dan tata cara pemilu.
Pewawancara	Apa yang Mbak rasakan saat berada di TPS 2019?
Informan	Waktu itu saya merasa agak cemas. Panitia menjelaskan sesuatu, tapi saya tidak mengerti. Saya mencoba membaca gerak bibir, tapi sulit karena mereka berbicara cepat dan memakai masker tipis waktu itu. Saya akhirnya menunjukkan kartu identitas dan menunjuk daftar nama untuk memastikan. Saya merasa prosesnya lebih lama bagi saya dibanding pemilih lain.
Pewawancara	Apakah ada perbedaan pada Pemilu 2024?
Informan	Pada 2024 saya merasa sedikit lebih nyaman karena saya sudah tahu alurnya. Selain itu, saya lebih percaya diri untuk langsung menunjukkan tulisan di HP kalau saya tidak mendengar. Panitia terlihat lebih sabar, tapi tetap tidak ada yang bisa bahasa isyarat. Jadi kendalanya masih ada, hanya saja saya yang lebih siap.
Pewawancara	Apakah Mbak datang sendiri atau didampingi?
Informan	Dua pemilu itu saya datang sendiri. Saya ingin mandiri. Tapi tetap saja, secara komunikasi saya tidak sepenuhnya mandiri. Saya harus menyesuaikan diri dengan sistem yang berbasis

	suara. Jadi meskipun saya tidak didampingi keluarga, saya tetap merasa harus berjuang sendiri memahami situasi.
Pewawancara	Apakah pernah terjadi kesalahpahaman?
Informan	Pernah di 2019, saya berdiri terlalu lama karena tidak sadar sudah dipanggil. Panitia akhirnya mendatangi saya dan menyentuh bahu saya. Saat itu saya kaget. Saya merasa tidak enak karena seperti memperlambat antrean, padahal saya memang tidak mendengar
Pewawancara	Apakah Mbak merasa partisipasi Mbak dihargai?
Informan	Saya merasa dihargai sebagai warga negara karena tetap bisa mencoblos. Tapi saya belum merasa sistemnya benar-benar ramah terhadap saya. Partisipasi saya lebih karena usaha pribadi, bukan karena fasilitas yang mendukung
Pewawancara	Kalau dibandingkan secara keseluruhan Pemilu, bagaimana Mbak melihat perbedaannya?
Informan	Secara prosedur hampir sama. Pelayanan 2024 mungkin lebih ramah, tapi secara sistem komunikasi belum banyak berubah. Saya masih harus menyesuaikan diri dengan sistem berbasis suara. Jadi perbedaannya lebih pada kesiapan diri saya, bukan perubahan sistemnya.
Pewawancara	Apa yang Mbak harapkan untuk pemilu berikutnya?
Informan	Saya berharap ada sistem antrean visual, misalnya nomor digital atau papan elektronik, supaya saya tidak harus menunggu sambil

	<p>cemas. Selain itu, akan sangat membantu jika ada petugas yang minimal memahami dasar bahasa isyarat. Bukan untuk perlakuan khusus, tapi agar komunikasi lebih jelas</p>
--	--